PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2024
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

JANUARI 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2024

Jalan. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga 28284
Telp (0761) 859750, 859752, 859754, 859756 Fax (0761) 859750, 859755
Laman https://bapenda.riau.go.id, Pos-el bapenda@riau.go.id
P E K A N B A R U

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga dapat diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau Tahun 2023 ini yang disusun berdasarkan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Amanatnya untuk semua OPD setingkat eselon II agar mempersiapkan Rencana Strategis OPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra. LKjIP merupakan merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dari pelaksanaan anggaran yang dialaksanakan oleh BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan public dalam hal perpajakan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Untuk kesempuranaan kinerja berikutnya kami mohon saran dan tangggapan untuk meningkatkan kinerja BAPENDa Provinsi Riau.

Pekanbaru, Januari 2024

Kepala BAPENDA Provinsi Riau

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi 1

1.3 Tugas dan Fungsi BAPENDA Provinsi Riau 6

1.4 Aspek Strategis Organisasi 7

1.5 Permasalahan Utama 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Riau 9

2.2 Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 12

3.1 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau 12

3.1.1 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023..... 13

3.1.2 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 14

3.1.3 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BAPENDA Tahun 2029-2024 15

3.1.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan 17

3.1.5 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan dalam Pencapaian pernyataan kinerja 20

3.2 Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP..... 22

4.1 Kesimpulan 22

4.2 Langkah Strategis 22

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan/ Pangkat Tahun 2023 3
Tabel 1.2 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/ Eselon Tahun 2023 4
Tabel 1.3 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 5
Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja BAPENDA Provinsi Riau 10
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau 10
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja 12
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja BAPENDA Tahun 2023 13
Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran BAPENDA Tahun 2023..... 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 3
Gambar 1.2 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan/ Pangkat Tahun 2023 8
Gambar 1.3 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/ Eselon Tahun 2023 9
Gambar 1.4 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan. Selain itu juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif serta perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ini sebagai gambaran Capaian Kinerja BAPENDA yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Tahun 2023 sebagai kontrak kinerja BAPENDA Provinsi Tahun 2023.

1.2. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang keuangan pada sektor pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana di atur oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya pada pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretaris** membawahi :
   a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Jabatan Fungsional Subbagian Perencanaan dan Program;
   c. Jabatan Fungsional Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. **Kepala Bidang Pajak Daerah** membawahi :
   a. Kepala Subbidang Penerimaan PKB dan BBN KB;
   b. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
   c. Jabatan Fungsional Subbidang Verifikasi, Pelaporan dan Publikasi Pajak Daerah.
4. **Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil** membawahi :
   a. Kepala Subbidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
   b. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
   c. Jabatan Fungsional Subbidang Dana Bagi Hasil Pajak.
5. **Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan** membawahi:
   a. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan;
   b. Kepala Subbidang pengembangan Sistem Informasi;
   c. Jabatan Fungsional Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
6. **Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan** membawahi :
   a. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
   b. Kepala Subbidang Pengawasan Penerimaan Daerah;
   c. Jabatan Fungsional Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi BAPENDA Provinsi Riau

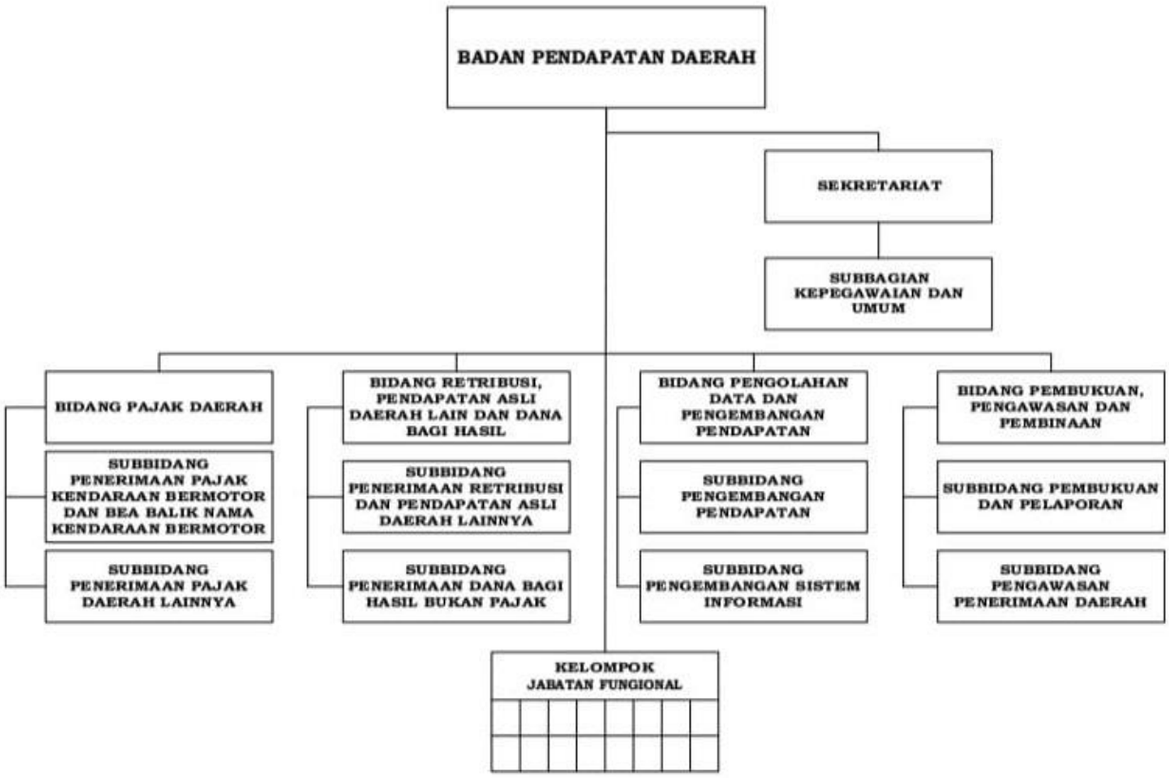

Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023

1.3. Tugas dan Fungsi BAPENDA Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas fungsinya yaitu :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
3. Pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.

4. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detail tugas dan fungsi masing masing jabatan pada BAPENDA Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
3) Pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
4) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

II. Sekretaris

1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis,

Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi Perencanaan Program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
5) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah;
6) Pengoordinasian penghimpunan standar operasional prosedur Badan Pendapatan Daerah; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Kepala Bidang Pajak Daerah

1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pajak Daerah;
2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pajak Daerah;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, meliputi antara lain kegiatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pajak daerah lainnya, serta verifikasi dan pelaporan pajak daerah;
4) Penyusunan perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota;
5) Pelaksanaan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan Instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
6) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pajak Daerah;

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, meliputi antara lain Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil; dan
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

V. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
3) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, meliputi antara lain Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan Pendapatan, serta Pengolahan Data Pendapatan;

4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembukuan, pengaawasan dan pembinaan, meliputi antara lain Pembukuan dan Pelaporan, Pengawasan Penerimaan Daerah, serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan; dan
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, ini dapat terlihat dari penerimaan pajak daerah yang meningkat dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Terdapat tiga jenis pajak yang terus dioptimalkan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau setiap tahunnya. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya tentunya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan

Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibantu oleh 43 Unit Pengelolaan Pendapatan pelayanan yang terdiri dari 20 kantor UPT Pengelolaan Pendapatan dan 23 kantor UP Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di 12 kabupaten / kota se-Riau, 1 pelayanan samsat keliling, 1 loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik kota Pekanbaru, serta 1 loket pelayanan pada Samsat Drive Thru.

Pagu anggaran yang diberikan pada BAPENDA pada tahun 2023 pada anggaran murni sebesar Rp.218.186.052.370 dan pada anggaran perubahan sebesar Rp.254.674.246.314 dengan rincian mencakup 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memiliki sumber daya aparatur sebanyak 501 orang terdiri dari 287 laki-laki dan 214 perempuan, yang tersebar di Kantor Pusat dan 20 UPT dan 22 UP Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau.

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan/Pangkat Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 501 orang Aparatur Sipil Negara dengan perincian digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah PNS/ASN BAPENDA Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2023

No	Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Golongan IV	34	16	50	9,98
2	Golongan III	221	187	408	81,44
3	Golongan II	32	11	43	8,58
Jumlah		287	214	501	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berjumlah sebanyak 501 orang, yang didominasi oleh Golongan III berjumlah 408 orang atau 81,44%, Golongan IV yang berjumlah 50 orang atau 9,98%, sedangkan untuk Golongan II berjumlah 43 orang atau 8,58%.

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan/pangkat dapat dilihat gambar berikut ini :

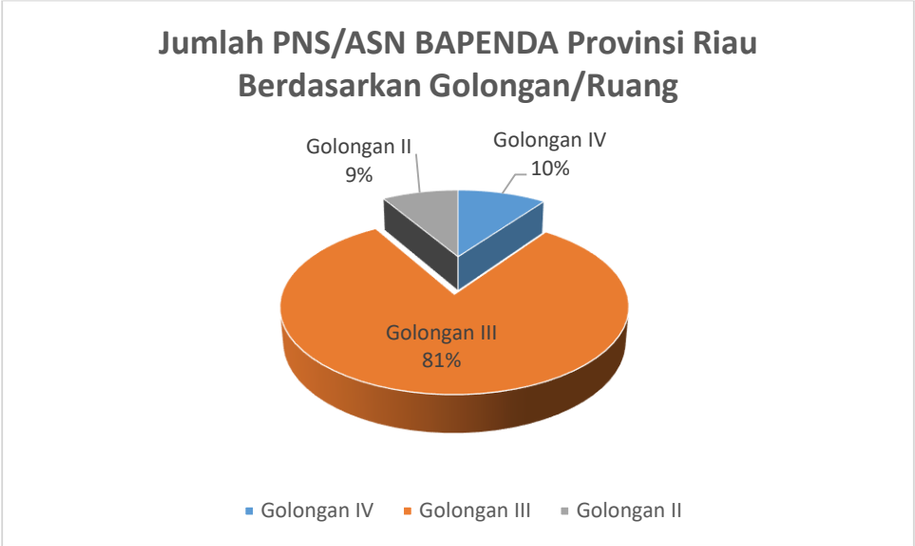

Gambar 1.2 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2023

b. Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselonering

ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berjumlah 501 orang, berdasarkan jabatan/eselon dapat dilihat sebagaimana data pada tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau
berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2023

No	Jabatan/Staf	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Eselon II	1		1	0,2
2	Eselon III	12	4	16	3,19
3	Eselon IV	42	18	60	11,98
4	Pelaksana	215	185	400	79,84
5	Jabatan fungsional	17	7	24	4,79
Jumlah		287	214	501	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2023

Dari data pada Tabel 1.2. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan/Esselonering di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh Jabatan Pelaksana yang berjumlah 400 orang atau 79,84%. Untuk esselon IV berjumlah 60 orang atau 11,98%, untuk esselon III berjumlah 16 orang atau 3,19%, dan Esselon II berjumlah 1 orang atau 0,2% yang tersebar di Kantor Induk dan sejumlah UPT/UP Pengelolaan Pendapatan se-Provinsi Riau, sedangkan untuk Jabatan Fungsional berjumlah 24 orang atau 4,79%.

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini :

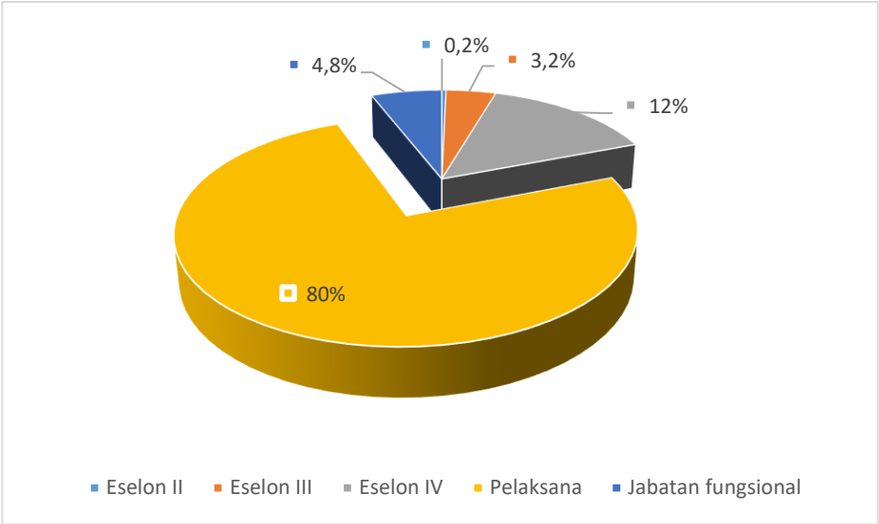

Gambar 1.3 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselonering Tahun 2023

c. Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan ASN BAPENDA Provinsi Riau sejumlah 501 orang dan rata-rata cukup baik serta sesuai standar pendidikan yang dibutuhkan, untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	Sarjana Strata III (S3)	1		1	0,2
2	Sarjana Strata II (S2)	60	39	99	19,76
3	Sarjana Strata I (S1)	151	121	272	54,29
4	Diploma IV (D-IV)	10	6	16	3,19
5	Diploma (D-III)	22	19	41	8,18
6	SLTA sederajat	43	29	72	14,38
Jumlah		287	214	501	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dari 501 orang ASN BAPENDA Provinsi Riau terdapat 99 orang atau 19,76% yang berpendidikan Sarjana Strata II (S-2), yang berpendidikan Sarjana Strata I (S-1) sejumlah 272 orang atau 54,29%, yang berpendidikan Diploma IV sejumlah 16 Orang atau 3,19%, yang berpendidikan Diploma III (D-III) sejumlah 41 orang atau 8,18%, serta yang

berpendidikan SLTA berjumlah 72 atau 14,38% dan akan digambarkan melalui diagram berikut ini :

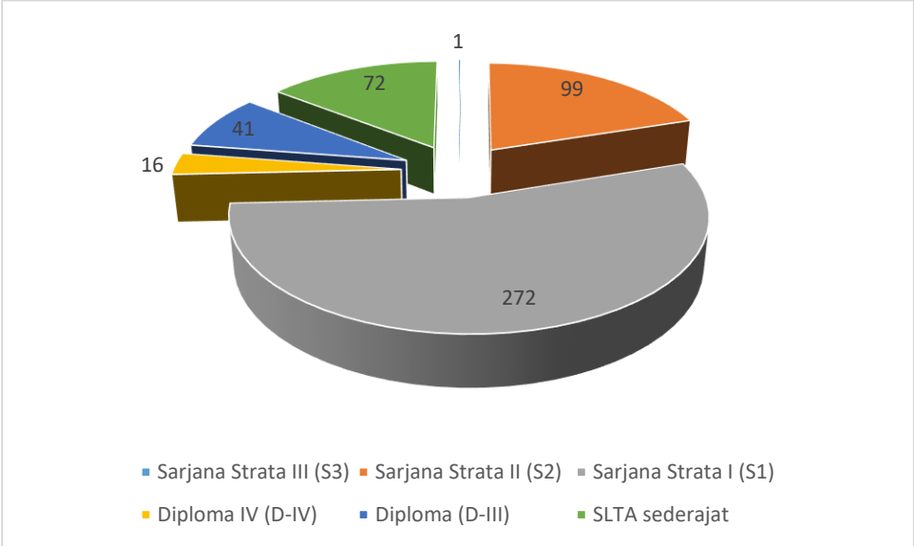

Gambar 1.4 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan publik.

1.5. Permasalahan Utama

Sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala BAPENDA Provinsi Riau yaitu :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, sehingga pelayanan publik harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan.
2. Potensi obyek pajak dan retribusi daerah yang baru harus terus digali dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
3. Harmonisasi dengan instansi vertikal, OPD penghasil dalam membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Regulasi terhadap penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah belum terakomodir dan terealisasikan dengan baik.

5. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan public di UPT dan UP Pengelolaan Pendapatan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kemenpan RB melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik PEKPPP.

1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2022 maka kami lampirkan tindak lanjut hasil evaluasinya sebagai berikut :

TINDAK LANJUT LHE SAKIP BAPENDA PROVINSI RIAU TAHUN 2022

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum membuat formulasi perhitungan indikator dalam pencapaian (achievable), menantang dan realistis	Membuat formulasi perhitungan indikator dalam pencapaian (achievable), menantang, dan realistis pada target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja	Telah membuat formulasi perhitungan indikator dalam pencapaian (achievable), menantang, dan realistis pada target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja
		Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Menyusun Perencanaan Kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Telah membuat Perencanaan Kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
2	PENGUKURAN KINERJA	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah menginput aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Perangkat Daerah		
3	PELAPORAN KINERJA	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan Kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam membuat infromasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan	Menyusun informasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan	Telah membuat informasi dalam laporan kinerja yang diketahui oleh pimpinan
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Melaksankan evaluasi kinerja internal oleh SDM yang memadai	Telah melakukan evaluasi kinerja internal secara periodik
		Peningkatan implementasi SAKIP belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP	Telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
		Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
		Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Telah memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Pekanbaru, Juli 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU

SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Riau

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau yang mencakup Visi, misi, tujuan, sasaran dan indkator kinerja pencapaian sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam Bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. Visi

BAPENDA Provinsi Riau dalam rangka mendukung RPJMD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 melalui dukungan visi Gubernur Riau yaitu Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, bermartabat dan Unggul di Indonesia.

B. Misi

Misi Gubernur Riau yang didukung BAPENDA Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, Bapenda Provinsi Riau merumuskan 1 (satu) tujuan yaitu "Tercapainya Pendapatan Daerah".

D. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut Bapenda Provinsi Riau memfokuskan pada 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah.

E. Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Riau tersebut diukur dengan beberapa indikator seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Tujuan Dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	*Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -	
								2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	9	10
1	Tercapainya Kemandirian Fiskal			Persentase PAD terhadap Keseluruhan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun n / Realiasasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun n X 100%	Persen	58,40%	60%	60%
		1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun n	Rupiah	Rp5.777.172.223.862	Rp4.714.861.201.145	Rp4.858.702.690.515
				Rasio Efektifitas PAD	Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun n / Realiasasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun n X 100%	Persen	99,59%	100%	100%
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87%	92%	92%
		3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP	SAKIP Bapenda Provinsi Riau Tahun n	Nilai		81%	82%

2.2. Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berisikan penugasan dari Gubernur Riau sesuai tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target sehingga target pendapatan dapat dipenuhi. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut;

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.8.226.767.000.000	Rp.5.801.084.335.607
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	100%
		Rasio Efektivitas Dana Transfer	100%	-
		Rasio Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	100%	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	-	76

Berdasarkan tabel diatas pada perjanjian kinerja diawal tahun 2023 terdapat 2 sasaran yaitu sasaran ke 1 dan ke 2, untuk sasaran ke 3 merupakan

hasil rekomendasi ketika pembahasan dengan Kemenpan RB sekitar bulan Juli 2023 yang bertempat di Ruang Melati. Untuk indikator kinerja pada sasaran 1 diawal tahun 2023 memiliki 4 indikator, dan ketika di perubahan hanya memiliki 2 indikator. Hal ini juga merupakan hasil rekomendasi atau masukan dari Kemenpan RB yang menyatakan bahwa indikator Rasio Efektivitas Dana Transfer dan indikator Rasio Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan kewenangan pusat. Sehingga daerah dianggap tidak dapat mempengaruhi target capaian dan hanya bersifat pemberian dari Pemerintah Pusat.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahunan merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Mengumpulkan dan mengolah data hasil sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat dan efektifitas. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/ realisasi kinerja belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

3.1.1. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penetuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dan indikator seperti berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja BAPENDA Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023 (Perubahan)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/4)x100%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	99,59%	99,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	87	94,57%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	75,65	99,54%

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel diatas maka realisasi capaian kinerja BAPENDa Provinsi Riau secara keseluruhan rata rata diatas 94% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara realisasi sasaran strategis yang terendah capaiannya pada sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah sebesar 94,57% yang didapat berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada seluruh UPT dan UP Bapenda Provinsi Riau selama satu tahun anggaran. Dan terbesar pada sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,59%

yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran.

3.1.2. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2022		
			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%	Rp.4.854.503.225.590	Rp.4.696.664.986.181	96,75%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	99,59%	99,59%	100%	96,75%	96,75%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	87	94,57%	85	81,09	95,40%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	75,65	99,54%	76	74,85	98,49%

Berdasarkan pengolahan data tabel diatas maka capaian kinerja tahun 2023 lebih meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Dari sasaran strategis pertama dengan 2 (dua) indikator yaitu angka pendapatan asli daerah yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran, realisasinya mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Untuk sasaran strategis kedua dengan 1 (satu) indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat yang didapat berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada seluruh UPT dan UP Bapenda Provinsi Riau selama satu tahun anggaran, realisasinya juga mengalami peningkatan di tahun 2023. Untuk sasaran strategis ketiga dengan 1 (satu) indikator yaitu nilai sakip yang didapat dari hasil evaluasi Kementerian PAN RB terkait penilaian SAKIP OPD, realisasinya juga mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2022 belum menjadi IKU eselon 2 (Kepala OPD).

3.1.3. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.8.226.767.000.000	Rp.5.777.172.223.862	70,22%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	99,59%	99,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	90	87	96,67%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	0	75,65	0

Berdasarkan pengolahan data tabel diatas maka capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target renstra BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2023 untuk Sasaran strategis pertama dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka Pendapatan Asli Daerah sebesar 70,22% yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran dan indikator Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,59% yang didapat dengan membandingkan PAD dengan Pendapatan Daerah pada satu tahun anggaran. Sasaran strategis kedua dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,67% yang didapat yang didapat berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada seluruh UPT dan UP Bapenda Provinsi Riau selama satu tahun anggaran. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dengan indikator nilai SAKIP yang didapat dari hasil evaluasi Kementerian PAN RB terkait penilaian SAKIP OPD dimana pada saat penyusunan Renstra masih dijadikan IKU Biro Organisasi, akan tetepi pada pertengahan tahun 2023 pada saat penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja dilimpahkan untuk menjadi IKU Eselon 2 (Kepala OPD) sehingga capaiannya jika dibandingkan akan menghasilkan capaian kinerja 0%.

3.1.4. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.8.647.077.000.000	Rp.5.777.172.223.862	66,81%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	99,59%	99,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	95	87	91,58
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	0	75,65	0

Berdasarkan pengolahan data tabel diatas maka capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2024 untuk Sasaran strategis pertama dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka Pendapatan Asli Daerah sebesar 66,81% yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran dan indikator Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,59% yang didapat dengan membandingkan PAD dengan Pendapatan Daerah pada satu tahun anggaran. Sasaran strategis kedua dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,59% yang didapat yang didapat berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada seluruh UPT dan UP Bapenda Provinsi Riau selama satu tahun anggaran. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dengan indikator nilai SAKIP yang didapat dari hasil evaluasi Kementerian PAN RB terkait penilaian SAKIP OPD dimana pada saat penyusunan Renstra masih dijadikan IKU Biro Organisasi, akan tetepi pada pertengahan tahun 2023 pada saat penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja dilimpahkan untuk menjadi IKU Eselon 2 (Kepala OPD) sehingga capaiannya jika dibandingkan akan menghasilkan capaian kinerja 0%.

3.1.5. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 dibandingkan dengan Standar Nasional

Untuk capaian kinerja BAPENDA yang sesuai dengan IKU BAPENDA Provinsi Riau tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Standar Nasional atau Target Nasional.

3.1.6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023 (Perubahan)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/4)x100%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	99,59%	99,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	87	94,57%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	75,65	99,54%

Pada tahun 2023 BAPENDA Provinsi Riau berhasil meningkatkan pendapatan dan tercapai kemandirian fiskal, hal ini didorong beberapa hal yang menunjang keberhasilan dalam capaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau. Akan tetapi tentu tidak terlepas juga permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

A. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diindentifikasi permasalahan yang diperoleh dari peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan seperti terangkum dibawah ini :

1) Perlunya database wajib pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak air permukaan (PAP) sehingga diperoleh database wajib pajak yang valid.
2) Perlunya sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemetaan potensi pajak, serta pemungutan pajak kepada wajib pajak. Mengingat pemerintah Kabupaten/ Kota juga memperoleh persentase atas pembagian pajak tersebut.
3) Perlunya rekonsilasi dan penyesuaian data kendaraan bermotor dengan Kepolisian dan Jasa Raharja, serta pihak swasta.
4) Perlunya penyiapan SDM untuk melakukan pengawasan rutin terhadap objek pajak air permukaan.
5) Perlunya Optimalisasi perubahan balik nama kenderaan non BM kepada BM.

6) Perlunya peningkatkan koordinasi pengelolan retribusi bersama OPD pemungut retribusi dan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan retribusi yang ada agar penerimaan retribusi optimal.
7) Perlu prioritas pembangunan tempat pelayanan UPT Samsat yang layak dan penerapan sistem antri yang tidak terlalu lama mengikuti standar waktu yang ideal sehingga Wajib Pajak (WP) dapat cepat terlayani dan memberi kepuasan bagi WP.
8) Perlunya reward terhadap UPT yang memberikan kontribusi pendapatan lebih tinggi daripada UPT lainnya. Hal ini memotivasi UPT utk kreatif, jemput bola dan pengawasan maksimal terhadap sumber-sumber pendapatan yang bisa meningkatkan PAD.
9) Perlu perhatian sungguh-sungguh pada sumber-sumber pendapatan lainnya berupa BLUD di SMK (pemakaian hotel, laundry, ruang teknisi, dan lain-lain) agar dapat didukung segera menggunakan Peraturan Gubernur sehingga retribusi pada objek tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD.

B. Solusi

Berdasarkan rangkuman permasalahan tersebut diatas, sudah ditindaklanjuti dengan solusi sebagai berikut :

1) Melakukan update database wajib pajak air permukaan yang ada di UPT/UP dengan melengkapi format yang isinya data-data perusahaan. Alamat, sumber air, Kapasitas mesin, jenis perusahaan, titik koordinat lokasi water meter, kondisi water meter dan cara pembayaran.
2) Menyurati OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan PAP seperti DPMTSP Kabupaten Kota dan Badan Pedapatan Daerah Kabupaten/Kota terkait perusahaan-perusahaan yag terdaftar di Kabupaten/Kota yang menggunakan Pajak Air Permukaan.
3) Secara bertahap sudah dilakukan update dan cleansing data bersama Ditlantas Polda Riau dan Jasa Raharja.
4) Menyediakan Anggaran Bimtek terkait Pajak Air Permukaan (PAP) dengan mengundang instruktur yang ahli di bidang PAP yang peserta nya perwakilan pegawai dari UPT/UP yang tupoksinya terkait dengan PAP.

5) Pelaksanaan program 7 berkah pajak daerah pembebasan BBNKB II terhadap kendaraan mutasi masuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 tahun 2023 tentang pembebasan dan/atau pengurangan pokok pajak

kendaraan bermotor terutang dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya serta sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

6) Badan Pendapatan Daerah telah melakukan rapat-rapat koordinasi bersama OPD pemungut retribusi terkait pembayaran secara Non tunai untuk mempermudah pelayanan kepada wajib retribusi. Rapat penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang HKPD merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah mengakomodir penyesuaian tarif dan pendataan Objek Retribusi baru. Monitoring juga dilakukan kepada seluruh OPD pemungut untuk menginventarisir permasalahan terhadap pengelolaan pada objek-objek retribusi yang belum optimal.
7) Telah dilakuan Pembangunan Gedung baru UPT yang memadai di Kota Dumai dan dilakukan Rehab pada Kantor UPT Samsat Pekanbaru Kota, Simpang Tiga, Tembilahan dan bangkinang beserta kelengkapan Sarpras pendukung.
8) Sudah dilaksanakan dalam bentuk pemberian prosentase insentif yang lebih besar untuk UPT/UP yang berhasil memenuhi target pendapatan.
9) Membentuk SMK menjadi BLUD dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD dengan menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan pendapatan BLUD.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi sumber daya, sarana prasarana dan juga efisiensi anggaran. Berdasarkan dari realisasi fisik keuangan pada akhir tahun anggaran 2023, maka dapat dirangkum beberapa sub kegiatan yang termasuk efisiensi anggaran yaitu :

1. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan serapan anggaran 57,55% dan capaian fisik 100%.
2. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan serapan anggaran 64,68% dan capaian fisik 90%.

Untuk sub kegiatan yang kurang baik dalam pelaksanaanya adalah sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

Sedangkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana terutama untuk di Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan (UPT PP) masih ada beberapa yang belum sesuai standar dari Kementerian PAN RB. Karena keterbatasan

anggaran, pemenuhan sarana prasarana dilaksanakan secara bertahap seperti di tahun 2023 pemenuhan sarana prasarana untuk UPT yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Pembangunan Gedung UPT PP Dumai
2. Pembangunan Drive Thru dan Pos Jaga di UPT PP Kerinci
3. Pembangunan Drive Thru, Pos Jaga dan ATM di UPT PP Tembilahan
4. Pembangunan Drive Thru di UPT PP Pekanbaru Kota

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023 (Perubahan)	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/4)x100%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	99,59%	99,59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	87	94,57%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	75,65	99,54%

Keberhasilan mencapai target kinerja pelayanan dan kemandirian fiskal sesuai yang diinginkan tidak terlepas dari keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di BAPENDA Provinsi Riau. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
e. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
f. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai capaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau yang sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sangat didukung oleh anggaran yang terdapat pada beberapa sub kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan seperti tergambar pada table dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran BAPENDA Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu (Perubahan)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%	Rp.7.700.041.551	Rp.5.879.498.364	76,36%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	99,59%	99,59%			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	87	94,57%	Rp.12.285.415.984	Rp.11.674.117.500	95,02%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	76	75,65	99,54%	Rp.147.296.925	Rp.131.776.443	89,46%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran terbesar ada pada sub kegiatan yang mendukung indicator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan capaian reaslisasi anggaran sebesar 95,02%. Sedangkan capaian realisasi anggaran terkecil ada pada sub kegiatan yang mendukung indikator angka pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu sebesar 76,36%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, Renja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Derah Provinsi Riau tahun 2019–2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 secara keseluruhan kinerja BAPENDA Provinsi Riau berhasil hal ini ditandai dengan capaian kinerja rata rata diatas 90% untuk ke empat indicator yang ditetapkan. Hal ini juga berdampak pada tahun 2023 BAPENDA Provinsi Riau berhasil mencapai kemandirian fiskal dalam kategori level menengah.

Untuk kedapannya BAPENDA Provinsi Riau akan terus meningkatkan kinerja khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan dalam rangka kenyamanan wajib pajak. Hal tersebut akan diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PAN RB. Pemenuhan sarana prasarana tersebut difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan (UPT PP) sebagai ujung tombak dalam mengelola pendapatan asli daerah. Pemenuhan sarana prasarana tersebut juga akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan pagu angggaran yang tersedia. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pelayanan juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak.

4.2. Langkah Strategis

Langkah strategis yang dilakukan BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2023 dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan beberapa langkah sebagai berikut :

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah

1. Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Riau nomor 6 tahun 2023 tentang Pembebesan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan Kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Menindaklanjuti kebijakan Gubernur Riau yaitu Himbauan Gubernur Riau nomor 973/BAPENDA/1125 tentang tujuh Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik, dengan melaksanakan Program 7 Berkah Pajak Daerah.
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (on-line system) serta peningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
4. Optimalisasi pelayanan PKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), Samsat Drive Thru, Mall Pelayanan Publik dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri.
5. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan.
7. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja.
8. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/rertibusi.
9. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.

3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara real time.
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri.
7. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak infrastruktur, lingkungan dan sosial.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan kedepannya untuk kemajuan Badan Pendapatan Provinsi Riau ke di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2024

Kepala BAPENDA Provinsi Riau

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

LAMPIRAN

1. PENJA BAPENDA PROVINSI RIAU TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODY SAPUTRA DINATA, S.STP, M.IP**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDRA MULYA, SE, MM**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
INDRA MULYA, SE, MM **Penata Tingkat I** **NIP. 19701104 200112 1 004**	**DODY SAPUTRA DINATA, S.STP, M.IP** **Penata Tingkat I** **NIP. 19900122 201010 1 002**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai	Prosentase tingkat kedisiplinan pegawai	100%
2	Terlaksananya Penyediaan sarana prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan	11 Unit
3	Terlaksananya Pemeliharaan sarana prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	11 Unit

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.821.113.768
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	90.917.900
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.997.795
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	428.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.764.582.340
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.026.000
7	Pengadaan Mebel	211.742.950
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	726.177.432
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.373.190.520
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.925.170.904

11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.480.000
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	543.545.000
Total		**190.770.944.609**

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

INDRA MULYA, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19701104 200112 1 004

Pihak Pertama,

DODY SAPUTRA DINATA, S.STP, M.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19900122 201010 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA, DAN DANA BAGI HASIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak**
Jabatan : **Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan Dana Bagi Hasil**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE, M.Si	**TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720626 199703 2 004	**NIP. 19690606 201102 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA, DAN DANA BAGI HASIL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi (Angka)	Rp. 25.970.361.800
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (Angka)	Rp. 1.576.794.107.709

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 424.097.562
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 237.508.404
	Total	**Rp. 661.605.966**

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE, M.Si	**TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19890606 201102 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SISWANDI PUTRA YR, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak**
Jabatan : **Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak	**SISWANDI PUTRA YR, SE**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19890606 201102 2 002	**NIP. 19800229 200502 1 002**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya potensi retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Jumlah laporan data subjek dan objek potensi retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	30 Laporan
2	Terlaksananya koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Jumlah instansi pengelola retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	30 OPD

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak
Penata Tingkat I
NIP. 19890606 201102 2 002

Pihak Pertama,

SISWANDI PUTRA YR, SE
Penata Tk. I
NIP. 19800229 200502 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA DAN DANA BAGI HASIL
SUB BIDANG PENERIMAAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMANTO, S.STP**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak**
Jabatan : **Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya Dan Dana Bagi Hasil**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak
Penata Tingkat I
NIP.19890606 201102 2 002

Pihak Pertama,

ISMANTO, S.STP
Pembina
NIP.19760914 199602 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 1997032 004

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA DAN DANA BAGI HASIL
SUB BIDANG PENERIMAAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.	Jumlah potensi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang dapat di optimalkan	22 Instansi (Pusat dan Daerah)
2	Terlaksananya koordinasi Penerimaan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.	Jumlah laporan hasil Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	12 Laporan

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

TIKA RAHMI SYAFITRI, SE, M.Ak
Penata Tingkat I
NIP.19890606 201102 2 002

Pihak Pertama,

ISMANTO, S.STP
Pembina
NIP.19760914 199602 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 1997032 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
EVAREFITA, SE, M.Si	**WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19771010 201102 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Penerimaan Asli Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Layanan Penerimaan Asli Daerah Berbasis Teknologi Informasi	3 aplikasi/fitur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.999.000
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	424.836.000
3	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	464.856.000
	Total	**1.221.691.000**

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE, M.Si	**WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19771010 201102 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EFFA AGUSTINA, SS, M.Si**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19771010 201102 2 001

Pihak Pertama,

EFFA AGUSTINA, SS, M.Si
Pembina
NIP. 19730808 200112 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi dalam optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah	Jumlah kerja sama pelayanan penerimaan asli daerah	5

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19771010 201102 2 001

Pihak Pertama,

EFFA AGUSTINA, SS, M.Si
Pembina
NIP. 19730808 200112 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARY BASTHOMI, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si	**ARY BASTHOMI, SE**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19771010 201102 2 001	**NIP. 19820329 201001 1 010**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengembangan teknologi informasi	Jumlah pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi	4 Aplikasi
2	Meningkatnya pengembangan mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan	Jumlah mekanisme sistem dan prosedur yang sudah dikembangkan	4 Aplikasi

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYU SETIOWATI, S.Pi, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19771010 201102 2 001

Pihak Pertama,

ARY BASTHOMI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820329 201001 1 010

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBUKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULISMA, S.Sos, MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan Dan Pembinaan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
EVAREFITA, SE, M.Si	**YULISMA, S.Sos, MM**
Pembina Utama Madya	**Pembina Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19690913 199811 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBUKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada UPT/UP	Persentase UPT/UP yang Tertib dalam Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah	20 UPT dan 22 UP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
(1)	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	
1	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	705.971.550

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

Pihak Pertama,

YULISMA, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690913 199811 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pajak Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE, M.Si	**MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si**
Pembina Utama Madya	**Pembina**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19860723 201001 1 009**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Angka)	Rp4.382.173.075.085,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Program Pengelolaan Pendpatan Daerah	
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	584.306.510
2	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	356.594.000
3	Penagihan Pajak Daerah	271.250.000
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.845.158.230
	Total	**3.057.308.740**

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

Pihak Pertama,

MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19860723 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAPITRI, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pajak Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si **Pembina** **NIP. 19860723 201001 1 009**	**SAPITRI, SE** **Penata Tk. I** **NIP. 19810623 200801 2 032**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya potensi pajak daerah	Jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB	PKB Rp. 1.491.936.822.000 BBNKB Rp. 1.138.184.823.500
2	Meningkatnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor	jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak	PKB Rp. 1.677.053 BBNKB Rp. 277.768

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19860723 201001 1 009

Pihak Pertama,

SAPITRI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19810623 200801 2 032

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KURNAIN, A.Md**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pajak Daerah**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si **Pembina** **NIP. 19860723 201001 1 009**	**KURNAIN, A.Md** **Penata Muda Tk. I** **NIP. 19781110 201001 1 023**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
BIDANG PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya rekonsiliasi dan koordinasi realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan	47.442.871.213
2	Tersusunnya rekonsiliasi dan koordinasi realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.149.310.237.047

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD SAYOGA, SE, M.Si
Pembina
NIP.198607232010011009

Pihak Pertama,

KURNAIN, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP.197811102010011023

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 1997032 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARMALIS, S.Sos**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE, M.Si	**DARMALIS, S.Sos**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP.19720628 199703 2 004	**NIP.19680826 199103 1 005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pkb, BBN-KB Dan Pajak Air Permukaan (AP)	Rp.38.872.371.035

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp.237.117.831	
2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp.304.205.628	
3.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp.67.190.000	
	Total	**Rp.608.513.459**	

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19720628 199703 2 004

Pihak Pertama,

DARMALIS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19680826 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAFIFURRAHMAN, S.IP, M.A**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DARMALIS, S.Sos**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

DARMALIS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19680826 199103 1 005

Pihak Pertama,

HAFIFURRAHMAN, S.IP, M.A
Penata Muda Tingkat I
NIP.19950903 201708 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembinaan terhadap upt/up	Jumlah UPT/UP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 UPT
			1 UP

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp 237.117.831**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Rp 4.900.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 32.707.926	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 11.500.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 9.999.905	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4,000,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 174.010.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 304.205.628**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 301.205.628	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 67.190.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp 44.570.000	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 22.620.000	
	Total	**Rp 608.513.459**	

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

DARMALIS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19680826 199103 1 005

Pihak Pertama,

HAFIFURRAHMAN, S.IP, M.A
Penata Muda Tingkat I
NIP.19950903 201708 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE., M.Si	**LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19830223 201001 2 007**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pkb, BBN-KB Dan Pajak Air Permukaan (AP)	1.301.156.505.872

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp247.298.225	
2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp355.085.529	
3.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp94.170.000	
Total		**Rp 696.553.754**	

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EVAREFITA, SE., M.Si	**LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Pembina Utama Madya	**Penata Tingkat I**
NIP. 19720628 199703 2 004	**NIP. 19830223 201001 2 007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESSI TARINA, SH**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan pendapatan Pekanbaru Kota**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si **Penata Tingkat I** **NIP.198302232010012007**	**DESSI TARINA, SH** **Penata Tingkat I** **NIP.198212012010012014**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembinaan Terhadap UPT/UP	Jumlah UPT/UP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1 UPT

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si
Penata Tingkat I
NIP.198302232010012007

Pihak Pertama,

DESSI TARINA, SH
Penata Tingkat I
NIP.198212012010012014

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SEKSI PENERIMAAN UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAN SUASTY SALEH, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Seksi Penerimaan UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan pendapatan Pekanbaru Kota**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si	**WAN SUASTY SALEH, S.Sos**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19830223 201001 2 007	**NIP. 19710408 200012 2 002**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SEKSI PENERIMAAN UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Potensi Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB	288 Laporan
		Jumlah laporan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan	24 Laporan

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp 175.363.612**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 130.363.612	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 45.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 351.885.529**	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 351.885.529	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 60.610.000**	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.610.000	
Total		**Rp 587.859.141**	

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si **Penata Tingkat I** **NIP. 19830223 201001 2 007**	**WAN SUASTY SALEH, S.Sos** **Penata Tingkat I** **NIP. 19710408 200012 2 002**

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SEKSI PENAGIHAN UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI AISYAH, S.STP**
Jabatan : **Kepala Seksi Penagihan UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala UPT. Pengelolaan pendapatan Pekanbaru Kota**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **EVAREFITA, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si	SITI AISYAH, S.STP
Penata Tingkat I	Penata
NIP. 19830223 201001 2 007	NIP. 19930603 201609 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
SEKSI PENAGIHAN UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Penagihan Aktif atas Piutang Pajak Daerah	384 Dokumen
		Jumlah Dokumen Surat Peringatan pada wajib pajak	384 Dokumen
		Jumlah Kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Permukaan	2 Wajib Pajak

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp 71.934.613**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Rp 24.200.000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 9.959.613	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.500.000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 30.275.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 3,200,000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 33,560,000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp 33,560,000	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Total		**Rp 108.694.613**	

Pekanbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

LUSIA FEBRIANI, SE., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19830223 201001 2 007

Pihak Pertama,

SITI AISYAH, S.STP
Penata
NIP. 19930603 201609 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

EVAREFITA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004